

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN PILIHAN LOKASI USAHA PKL SEBAGAI BAGIAN DARI HIERARKHI STRUKTUR KOMERSIAL DI SEMARANG

*(Factors Influence The Growth and Choise For Street Trading Activities
Site As Part of Commercial Structure Hierarchy in Semarang City)*

Sri Yuwanti - Staf Balitbang Propinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

Street vendings is a phenomenon which is found in every society, mostly in the less developed country. It is also a sign of dual economic or crisis, in which many people will try to work informally. The suspected key elemen triggers the dual situation mostly is pointed to the urbanization , involution, and city–village development policy, which impacted in the change of land-use, industrialization, and unemployment in the city as well as the village.

Factors influencing the choice for street-vending activities in such location are related more to the availability of consumers, transportation access and strategic site than the hierarchi of the commercial structure. Semarang street-vending case also proves that the transport cost is not the concern of street-vendors to shop, but their business time and quality of the product they will sell. For Semarang street-vendors, profit is not the only objective, since the sustainability of their business is more important. Their needs are related more to their problems those are, to have a proper and secure place for business and a reasobable income from their small capital.

Keywords: *streetvending, street trading, urbanization, dual economic, commercial structure*

PENDAHULUAN

Penelitian ini tentang PKL dan persoalannya di perkotaan, yaitu masalah lokasi usaha dikaitkan dengan pola pemilihan lokasi oleh PKL. Pola lokasi usaha PKL diuji kaitannya dengan kegiatan usaha produksi atau perdagangan yang lebih besar di kota Semarang, untuk membuktikan apakah PKL merupakan bagian atau perpanjangan dari sistem sektor usaha formal (bagian hierarki struktur komersial). Kaitan antara keberadaan PKL dengan perkembangan struktur kota, difahami dengan teori pertumbuhan struktur kota dan teori

ekonomi perkotaan.

Dalam lingkup yang lebih luas , studi ini merupakan studi tentang struktur ruang kota abstract, dengan ekonomi sebagai alat untuk menjelaskan. Perubahan ruang kota diperkirakan dipengaruhi oleh pertumbuhan struktur abstract tersebut, meskipun secara fisik ruang tersebut tidak berkembang. Perubahannya dapat berupa kemunduran performance, penumpukan fungsi dan penggunaan fisik ruang tertentu, atau lainnya.

Ruang fisik dapat berubah karena dinamika perkotaan dan perjalanan waktu. Dalam kasus PKL, perubahan ruang fisik yang diamati adalah

lokasi tempat usaha mereka, yang pada kenyataannya telah berubah. Sesuai dengan konsep pembangunan ekonomi yang dianut Indonesia saat ini, kota dalam studi ini lebih difungsikan sebagai tempat *agglomerasi* barang dan jasa, sebagai pusat ekonomi, atau dalam kata lain : pasar. Realita keberadaan PKL dalam ruang kota dengan demikian dianalisa dalam hubungan fungsional PKL pada sistem pemasaran atau perdagangan di kota.

BAHAN DAN METODA

Tahapan penelitian saat ini masih dalam rangka identifikasi faktor pertumbuhan PKL dan tipologi tentang pilihan lokasi usaha mereka, dalam setting lokasi tertentu. Data awal tentang PKL resmi per kelurahan merupakan data dasar dan bahan yang dikaji. Seleksi terhadap unit lokasi observasi, dihubungkan dengan sifat PKL yang unik dan khusus, antara lain: *foot lose* (tidak menetap,bisa pindah kemana saja), tidak tetap, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, dan atau bersifat *transitory* (sementara, selama belum dapat pekerjaan tetap). Pemilihan lokasi pada penelitian ini didasari dengan asumsi adanya keterkaitan antara pertumbuhan PKL dengan perkembangan pusat perdagangan, dan dengan upaya perpanjangan pelayanan usaha tertentu kepada konsumen dari produsen produk industri tertentu.

Bahan yang digunakan adalah data tentang PKL di kota Semarang dan struktur ruang kota Semarang saat ini (2003) terutama pusat-pusat perdagangan, pasar, dan tempat pertumbuhan PKL. Sebagai referensi untuk pengertian PKL dan sektor informal di kota, diangkat dari hasil-hasil penelitian Alisyahbana (2003), Evers dan Korff (2002), Silas (1996), Breman (1990) dan Effendi (1988) di Alisyahbana (2003), Forbes

(1979) dan Mazumdar (1976) di Manning(1985), dan Cliffort Geertz (1963). Pengertian tentang kota dan struktur ruang kota diambil dari teori dan konsep perkotaan dan urbanisasi dari beberapa pakar al. Howard (1898), Burgess.et.al (1925), Harris dan Ullman(1945), Nelson (1969), Hoyt(1964), Weber(1965) semuanya di Bourne (1971), dan Hall (1998).

Guna melihat hubungan antara kegiatan PKL dengan kegiatan komersial yang lebih besar, metode yang dipilih adalah metode yang digunakan oleh Berry (1963) tentang *urban commercial structure*, yang dikembangkan lagi oleh Boal dan Johnson (1965) tentang *commercial ribbon*. Apabila hasilnya tidak sesuai, maka PKL tidak tepat bila dianggap sebagai kepanjangan usaha atau dikaitkan dengan sektor formal, karena sifat dan naturenya memang berbeda. Dalam hal ini, akan dilakukan lagi pemilihan terhadap unit observasi dengan metode yang berbeda.Untuk ini, akan digunakan teori dan konsep Bose (1974) tentang sektor informal, atau Silas(1996) yang menyatakan bahwa PKL adalah fenomena yang terpisah dari usaha formal, sebagai alternatif ketiga setelah sektor tradisional dan modern. Penjelasan akan dikaitkan dengan pola mobilitas desa-kota, konurbasi, involusi pedesaan, dan kemiskinan kota.

Data sekunder diambil dari dokumen PKL kota Semarang, sedangkan data primer dilakukan dengan wawancara kepada PKL terpilih. Pengambilan data lapangan dilakukan setelah mendai peta berdasarkan data lokasi kegiatan PKL tercatat yang telah diperoleh di pendataan awal. Pengamatan dilakukan dengan mengikuti proses yang digunakan Berry dalam studinya mempelajari struktur komersial, kemunduran, dan perubahan struktur kota Chicago.

Dalam prosedur Berry, lokasi yang diamati adalah pusat bisnis di tengah kota, dan dalam radius tertentu akan dilihat pertumbuhan retail dan jenisnya, baik berupa toko kecil maupun warung. Data lokasi PKL yang disediakan/legal dan jumlah PKL tercatat di lokasi tersebut. Lokasi observasi kemudian dipilih dengan mengasumsikan adanya kaitan lokasi tersebut dengan pusat bisnis yang ada, dalam hal ini Pasar Johar di pusat kota lama, dan pasar kecil di lokasi terdekat dengan tempat usaha PKL. Dengan menggunakan peta kota yang dijadikan sample /kasus, lokasi pusat bisnis di pusat kota dan jaringan luarnya, ditandai dengan warna yang berbeda. Dari peta tersebut, lokasi dengan jumlah PKL tercatat tertentu, diambil sebagai sampel lokasi pengamatan, serta didata kepadatan dan jenis PKL nya. Dari masing – masing sampel lokasi diambil beberapa responden terdiri dari kelompok yang dipilih. Lokasi lain yang dianggap relevan adalah lokasi pemukiman dimana konsumen tinggal dan mempunyai pilihan untuk datang ke pusat bisnis utama atau pusat lainnya.

Secara garis besar, lokasi yang dijadikan fokus pengamatan (unit *observasi*) adalah: lokasi pusat bisnis pusat kota, lokasi pusat bisnis lainnya (*depletion*), dan lokasi pemukiman baik lama maupun baru, ditengah kota dan dipinggiran kota. Sample lokasi kota dipilih secara purposif karena alasan tertentu, lokasi fokus daerah pengamatan (unit *observasi*) dipilih untuk upaya pemahaman terhadap hakikat ruang dan keberadaan PKL dalam ruang dan perubahan struktur ruang.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kajian teori disusun beberapa asumsi, dan dengan setting lokasi tertentu dipilih responden PKL, untuk membuktikan sintesa hasil kajian teori tersebut.

Lokasi Simpang Lima dan wilayah sekitar

pasar Johar merupakan pusat kota lama dan baru yang diamati keterkaitannya dengan perkembangan PKL di pusat kota. Lokasi Ngaliyan merupakan representasi lokasi pemukiman baru dan sebagai daerah deplesi di jalur alternatif ke Kabupaten Semarang, Kendal dan Temanggung. Lokasi Banyumanik merupakan lokasi pemukiman di batas kota di jalur tradisional Semarang -Yogya/Solo.

Jumlah unit observasi 12 unit, terdiri dari:

- Empat (4) lokasi, yaitu di seputar lapangan Simpang Lima, menuju ruas jalan Gajah Mada, Ahmad Yani, Pahlawan, dan Ahmad Dahlan.
 - Empat (4) lokasi pembanding, antara lain di depan Undip untuk Pahlawan, depan Sri Ratu untuk ruas Gajah Mada menuju Pasar Johar, di depan Tlogorejo untuk ruas Ahmad Dahlan, dan sepanjang jalan Mataram untuk ruas Ahmad Yani. Lokasi sekitar Taman KB /SMUN I diamati karena merupakan lokasi khusus berjualan siang hari dan tempat penitipan gerobag PKL, merupakan bagian dari ruas jalan Pahlawan.
 - Dua (2) lokasi di daerah permukiman baru, yaitu di dekat pasar Ngaliyan (ruas jalan ke Tugu) dan di pemukiman penduduk, diambil PKL di pertigaan perumahan Sultanji Graha.
 - Dua (2) lokasi di daerah permukiman di batas kota bagian selatan, yaitu Banyumanik, antara lain di ruas jalan keluar tol sampai Pasar Banyumanik, dan dekat pemukiman Banyumanik, di depan toko Sarinah.
- Sampel responden, merupakan informan, dipilih secara purposif dengan alasan tertentu tidak tergantung jumlah karena yang diperlukan adalah pemahaman atas proses dan karakter secara mendalam pada tiap kasusnya.

Responden PKL di lokasi observasi diambil berdasarkan kriteria Perda, yaitu: dapat dipindahkan dan menempati lahan pemerintah atau fihak lain. Responden PKL terdiri dari seorang pedagang dan seorang “gate keeper”, yang mungkin juga merupakan pengelola, atau pimpinan paguyuban PKL di lokal yang diamati, karena mereka dianggap paling mengetahui tentang situasi dan kondisi kelompoknya. Lama berjualan harus lebih dari 6 bulan di lokasi tersebut terutama bagi penjual makanan, dengan perhitungan apabila dalam 6 bulan seorang PKL bisa berjualan tetap, tanpa gangguan, berarti usahanya layak/tidak merugi dan sudah dapat dianggap berhasil. Bagi penjual non makanan, lama berjualan tidak dijadikan kriteria. PKL harus PKL asli, dalam arti sebagai pekerjaan utama, bukan mereka yang “mocok” atau pekerjaan ini merupakan pekerjaan sampingan. Responden konsumen diambil *on the spot* di lokasi, baik konsumen tetap dari PKL responden dan/atau konsumen tidak tetap/ketebulan belanja. Jumlah responden seluruhnya 24 PKL, terdiri dari satu gate keeper (bila sudah ada paguyuban, ketua paguyuban dapat berfungsi sebagai *gate-keeper*) dan satu PKL bukan *gate-keeper*. Responden konsumen berjumlah 24 sesuai dengan jumlah responden PKL, didata latar belakang sosial ekonomi dan alasan mereka membeli di PKL.

Data dari PKL yang diambil terutama tentang jenis usaha, waktu usaha, besaran modal, jumlah tenaga kerja, kaitan kebelakang dengan produksi atau kegiatan ekonomi lain, pilihan tempat usaha, alasan berusaha, masalah yang dihadapi dan harapan PKL ke masa depan. Hal lain yang perlu diketahui sebelum memulai upaya untuk mengatur atau mendayagunakan PKL, antara lain tentang: siapa mereka, mengapa mereka memilih menjadi PKL, dan apa yang

mereka perlukan.

Dalam tahapan penelitian ini data dari PKL terutama terkait dengan faktor yang diamati, diantaranya: kondisi fisik lingkungan tempat usaha, cara berjualan, kelas konsumen, lokasi tempat tinggal PKL, penampilan fisik PKL, tingkat pendidikan, latar belakang sosial dan ekonomi, alasan berusaha pilihan tempat usaha, keterkaitan dengan hierarkhi struktur ekonomi, dan harapan ke depan. Data yang berkaitan dengan kondisi usaha, alasan usaha, persepsi, pilihan, dan lain-lain yang hanya dapat diperoleh dilapangan, diambil dengan cara wawancara terpandu kepada kelompok responden PKL. Data diolah dengan mempergunakan konsep hubungan kegiatan komersial dan struktur hierarkinya dalam ruang dan dilihat kesesuaiannya terutama pada ketidak berubahannya bentuk barang dan pelayanan ketika sampai pada konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Kondisi Umum

Lokasi usaha PKL tidak berkelompok sesuai jenis usaha, tetapi menyebar dan bervariasi. Meskipun demikian, lokasi tertata sudah diarahkan untuk mengelompokkan kegiatan PKL tertentu. Kota Semarang sudah mempunyai peraturan tentang lokasi dan luas lahan yang dapat digunakan untuk berdagang PKL, terdaftar per bagian wilayah kelurahan, dan pengelolaannya diserahkan kepada kelurahan. Kaitan pengelolaan ini adalah dengan sewa lahan tersebut untuk usaha.

PKL diteliti di unit lokasi yang diamati, sejumlah 24 terdiri dari 21(87,5%) penjual makanan masak di tempat atau siap saji, dan 3 (12,5%) penjual non makan, terdiri dari dua

penjual rokok dan satu penjual sepatu. Lama usaha berkisar antara 1 tahun sampai 35 tahun. Pendidikan bervariasi al: 37.5% SD (9), 33.3% SLTP (8), 29.16% SLTA (7). Usia berkisar antara 21 tahun sampai 59 tahun, tenaga kerja antara 1 sampai 6 orang, modal awal mulai dari 50 ribu sampai 25 juta, dengan keuntungan mulai dari "tidak tentu" sampai 60 ribu per hari. Kondisi lokasi : 9 (37.5%) bersih, 9 (37.5%) sedang, dan 6(32%) kotor antara lain di Undip (dasaran siang), Sri Ratu (non stop), Mataram (dasaran siang) dan Banyumanik (dasaran malam).

2. Kondisi usaha, jenis barang jualan, cara berjualan,

Sebagian besar PKL yang diteliti adalah penjual bahan basah berbentuk makanan langsung santap atau dimasak di tempat. Dalam kelompok ini, dijumpai pemodal menengah dengan skala usaha besar, usaha turun temurun menempati lahan tetap dan sudah mempunyai nama sebagai merek dagang (contoh Lumpia depan Sanitas , atau Martabak jalan Hasanudin, Lekker prapatan Gendingan/Gajahmada). Sebagian kecil berupa penjual bahan kering tahan lama seperti alat rumah tangga, mainan dan pakaian, baik sebagai barang produksi rumah tangga maupun produksi pabrikan, dengan mutu rendah, tidak bermerek/belum terkenal, dan mereka tidak akan berada dilokasi tersebut dalam waktu lama (berkeliling, sementara, mengikuti musim, dll).

Cara berjualan kelompok yang diamati sama, yaitu dengan atau tanpa dorongan, dengan atau tanpa tenda, dengan kursi atau lesehan, terutama bagi para penjual makanan. Bagi penjual barang rumah tangga, tekstil/pakaian atau mainan, mereka tidak tergantung pada tenda maupun gerobag dorongan, karena mereka mempunyai cara yang lebih efisien, yaitu

dikemas dalam karung plastik, dan atau dengan alat transportasi lainnya seperti sepeda motor, becak, angkutan umum, atau mobil sendiri.

Masalah yang ditimbulkan oleh kelompok pertama adalah kebersihan lingkungan (bau, sampah) dan perubahan fisik ruang usaha, sedang kelompok kedua relatif lebih bersih. Namun keduanya mengakibatkan hal yang sama, yaitu menyebabkan kemacetan terutama kalau tidak ada lahan parkir yang memadai dan meninggalkan sampah kering di lokasi usaha.

3. Kelas ekonomi konsumen

Kelas ekonomi konsumen kelompok penjual makanan, tidak dapat dideteksi karena mereka datang dengan bermobil maupun berjalan kaki. Walaupun demikian, konsumen jenis makanan tertentu yang berbahan baku mahal seperti seafood, sop kaki, nasi goreng babat, dsb, tampaknya mempunyai kelas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan konsumen makanan soto, bakso, mi jawa, atau nasi kucing. Kelas ekonomi konsumen bahan non makanan mudah diidentifikasi, karena mereka sebagian besar berasal dari kalangan pendapatan kecil. Konsumen kelompok makanan terdiri dari mahasiswa dan pegawai negeri, penghuni pemukiman terdekat, atau masyarakat umum dari kelas menengah ke bawah. Konsumen datang ke PKL karena mereka memerlukan, harga barang yang dijual terjangkau oleh kantong mereka, sesuai dengan selera, atau karena mereka sudah menjadi langganan.Dari faktor jarak, pilihan lokasi PKL adalah karena dekat dengan rumah, atau karena "kebetulan" sedang berkunjung ke lokasi tersebut.

4. Asal PKL dan latarbelakang sosial ekonomi keluarga.

PKL yang diobservasi hampir semua

berasal dari keluarga sederhana dengan tingkat pendidikan beragam. Latar belakang etnis bervariasi. Kebanyakan dari suku Jawa, tidak semua berasal dari Semarang meskipun 41.66% berasal dari Semarang (10) 29.1% dari wilayah Surakarta (7) yaitu Klaten, Karanganyar, dan Wonogiri, dan 16.66% dari daerah lain (4) yaitu 1 dari Jabar dan 3 dari Jatim (Lamongan, Malang, Sidoarjo).

5. Alasan pilihan usaha/faktor pendorong usaha

PKL tumbuh dengan berbagai alasan dan dipengaruhi banyak faktor. Dari hasil wawancara dengan responden di unit lokasi observasi, diketahui bahwa faktor utama berusaha mereka adalah ekonomi. Diantara alasan yang diajukan adalah alas an untuk mendapatkan penghidupan, agar mempunyai pekerjaan, berusaha semampunya dengan modal minimal agar modal kecil yang dimiliki tetap berputar, karena tidak ada kerjaan lain, atau, untuk mengisi kegiatan di masa pensiun. Sebagian besar PKL adalah pemodal kecil, tetapi ditemukan juga usaha PKL yang memerlukan modal besar seperti usaha makanan seafood, sop buntut, dan bebek goreng. Faktor yang menyebabkan mereka tetap berusaha meskipun hasilnya kecil adalah adanya konsumen tetap dan mereka mempunyai pekerjaan tetap. Sebagian besar usaha PKL adalah usaha kecil, dan usaha ini dikerjakan bersama dengan keluarga, atau dengan tenaga kerja yang sangat terbatas. Dengan modal ketekunan dan keyakinan bahwa mereka tetap diperlukan oleh konsumen dari kalangan tertentu, PKL akan selalu hadir sebagai penyedia layanan terdekat bagi konsumen. Bahkan para PKL kelilingpun bersedia memberi pelayanan *door to door* (misalnya penjual bakso, mie ayam, nasi goreng, krupuk, es, dll). Dari segi yang lain,

faktor keuntungan merupakan hal penting bagi PKL modal besar, sedangkan PKL modal kecil lebih mementingkan keamanan dan kelestarian usaha. Faktor berikutnya adalah motivasi sosial dan harga diri, dimana PKL bersedia hidup dengan bekerja keras dan sengsara, asal tidak mengemis. Mereka juga merasa masih berharga karena mempunyai usaha, bukan sebagai penganggur, dan masih memiliki potensi. Apabila dalam hal ini mereka hanya menjualkan barang orang lain, mereka tetap merasa terhormat karena masih dipercaya.

6. Masalah dan Harapan PKL.

Masalah yang dihadapi atau dirasakan paraPKL, antara lain adalah was-was kalau digusur, semakin ketatnya persaingan dengan semakin bertambahnya jumlah PKL, pajak/retribusi yang tinggi, adanya tekanan Pemkot, dan pemerasan oleh orang jalanan. Rugi atau untung dianggap sebagai bagian dari dinamika berusaha. Meskipun hasilnya kecil asal tetap “lumintu” atau mengalir setiap hari dan dapat diharapkan, sudah dirasakan cukup

Harapan mereka tidak jauh dari masalah yang dihadapi. Harapan kedepan para PKL antara lain adanya tempat usaha sah dan mapan sesuai dengan keperluan dan situasi kondisi mereka saat ini (dilokasi saat ini), adanya jaminan dari fihak kelurahan atau pemkot sehingga tidak perlu pindah berkali-kali, tidak merasa kuatir dikejar-kejar pasukan trantib. Tidak semua PKL menginginkan pindah menjadi pedagang sektor formal apabila berhasil. Hal ini tampak pada beberapa yang sudah lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sudah 35 tahun, berusaha di tempat yang sama, dengan usaha yang sama. Mereka juga tidak ingin pindah ke tempat lain karena selain harus mencari konsumen baru, juga terbebani dengan biaya pangkal (uang pangkal

untuk bangunan atau biaya lain) yang cukup besar. Pindah ke sektor formal selain memerlukan modal besar, harus membayar pajak, harus mempunyai tata buku/administrasi, dan belum tentu berhasil dalam kondisi ekonomi dan pasar saat ini.

B. Pembahasan

1. Pola Keterkaitan

a. Keterkaitan usaha dengan hierarkhi struktur komersial.

Dalam penelitian ini PKL yang diamati tidak mempunyai kaitan yang jelas dengan hierarkhi pelayanan bisnis yang lebih besar, misalnya pasar, atau distributor produk industri tertentu. Keberadaan mereka lebih tergantung pada selera konsumen, yang latar belakang ekonominya beragam, dan kegiatan PKL tidak jelas kaitan kebelakangnya, antara bahan baku yang digunakan, bahan yang dijual, atau pemilihan tempat sentral produksi, dengan lokasi tempat usaha mereka.

Sebagian PKL Semarang yang diamati mengambil bahan dari pasar Johar dan pasar Kobong, serta sebagian lagi mengambil bahan dari pasar Karang Ayu atau Peterongan. Ada sebagian kecil menggunakan bahan dari Bandungan. Pilihan terhadap pasar tempat belanja bahan baku terkait dengan waktu dasaran/berdagang. Sebagai contoh, PKL siang akan berbelanja di pasar pagi, sedangkan PKL malam akan mengambil bahan baku dengan berbelanja ke pasar mana saja, karena pasar pagi sudah tutup. Pasar Johar dipilih oleh sebagian besar responden karena relatif lebih lengkap dan aktifitasnya tidak terbatas waktu dibandingkan pasar Peterongan/Lampersari dan Karang Ayu. Sedangkan untuk kegiatan PKL tertentu, yaitu jagung bakar, penyotor bahan tetap selalu datang dengan mobil dan pedagang

jagung bakar akan mengambil bahan sesuai dengan omzet masing-masing semalam.

Pola kaitan bahan baku dengan pilihan pasar sangat bervariasi, dan usaha PKL juga tidak memberi gambaran adanya pola kelanjutan pelayanan fungsional dari pasar. Pola itu dilihat pada adanya benang merah distribusi suatu bahan tertentu yang berstruktur bertingkat dari produser awal sampai ke konsumen, dengan PKL sebagai simpul pelayanan terakhir. Usaha PKL yang bervariasi belum tentu mempunyai hubungan saling mendukung satu sama lain. Meskipun mereka berusaha di bidang yang sama, kemungkinan kesamaan bidang tersebut menimbulkan suasana kompetisi diantara mereka. Dengan demikian, pengertian hierarki struktur komersial tidak dapat diterapkan disini. PKL makanan juga tidak dalam posisi tersebut karena mereka merubah bahan dari mentah menjadi masak. Sedangkan untuk PKL non makanan, misalnya penjual sepatu, belum tentu mereka mengambil bahan dari pasar lokal atau produsen lokal. Lokasi asal barang dagangan mereka bahkan melampaui batas propinsi, misalnya dari Bandung, Jakarta, atau Surabaya. Dengan struktur yang lebih besar, dan sifatnya yang lebih bebas, lokasi pengamatan untuk struktur hierarki bahan ini harus diambil secara regional dengan melihat jalur pemasaran lintas propinsi atau Negara.

b. Kaitan pilihan lokasi usaha PKL dengan ketersediaan transportasi dan akses jalan

Faktor akses jalan dan transportasi umum menurut responden mempengaruhi pemilihan tempat usaha. Faktor adanya konsumen tetap di lokasi tersebut jelas merupakan pertimbangan, namun tanpa akses jalan dan transport, konsumen akan kesulitan mencapai lokasi PKL.

Lokasi usaha dipilih dekat dengan pusat bisnis, pemukiman kelompok tertentu, atau lokasi termudah dijangkau dan tempat kerumunan calon konsumen (tempat ramai, pinggiran jalan utama, dekat bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah). Ketepatan pilihan lokasi usaha sangat berpengaruh pada kelestarian usahanya.

Bila tidak ada lahan yang tersedia, atau mereka tidak mampu membayar sewa lahan dan menyediakan syarat lainnya, PKL cenderung akan keliling, dengan atau tanpa kendaraan, untuk menawarkan dagangan atau mengunjungi konsumen tetap mereka. Pilihan lokasi bagi yang keliling adalah adanya pemukiman dan jalan penghubung, dekat jalan utama dan atau tersedia angkutan umum, terutama bagi yang tidak mempunyai tujuan tetap. Bagi yang sudah mempunyai tujuan tetap, faktor transportasi ini diatasi dengan memilih tempat kost/sewa rumah yang dekat dengan lokasi konsumen.

2. Faktor yang mempengaruhi

a. Faktor Umum: kondisi dual dan ekonomi bazaar.

Dari beberapa hasil studi, ditemukan bahwa pasar dan kota di Asia tidak identik, karena pasar berpindah dan mengikuti pola transportasi baik berupa jalan, sungai, maupun pelabuhan dan mengikuti sirkulasi hari, sedangkan kota lebih sering diidentikan dengan keraton, tempat beribadah, pusat pemerintahan yang sifatnya menetap. (Lihat Supratikno(2000) dan Nastiti(2003)). **Studi-studi tersebut menunjukkan adanya kesamaan faktor dari pola perkembangan kota dan pasar di Eropa dan Amerika dengan pola perkembangan kota dan pasar di Jawa dan Asia, dimana transportasi merupakan salah satu faktor utama.**

Perbedaan tipe perkembangan kota Asia dan Eropa adalah adanya **dual ekonomi di kota-kota Asia** (dan Amerika Latin), karena hal ini tidak terjadi di kota-kota Eropa dan Amerika Utara . Contoh pola kegiatan kota dan desa yang terpisah, tampak lebih nyata di masyarakat Barat, sedangkan pola kegiatan kota Asia lebih merupakan bentuk campuran kegiatan desa dan kota. Evers dan Korff (2002: 9). Mengambil catatan dari Castells (1977) yang menulis tentang kondisi kota-kota Amerika Latin, Evers dan Korff melihat kota-kota Asia sebagai: simbiosa antara tradisi dan modern. Hal ini yang menyebabkan kota Asia menjadi unik, namun juga merugikan karena rentan terhadap benturan makna kota, dan sering terjadi konflik kepentingan. Sistem tarik menarik kepentingan kelompok di perkotaan, terutama antara si kaya dan si miskin terjadi di kota Asia dan Amerika Latin, terutama karena kebijakan modal dan teknologi selalu menguntungkan si kaya

Bentuk dualisme kota ini antara lain berupa perkembangan kegiatan ekonomi informal di perkotaan, ekonomi bazaar, dan perilaku-perilaku tertentu dari penduduk kota. Sebagai pembanding, Antony Giddens (1994) menyebutkan tentang **masyarakat post-tradisional, sebagai kondisi kolaborasi antara modern dan tradisional dan sebagai tahapan penting dalam perkembangan menuju modernisasi dan globalisasi**. (Contoh-contoh dalam tulisannya kebanyakan kasus di negara berkembang di Asia dan Afrika). Masih dalam kaitan dengan situasi dual tersebut, di dalam proses perencanaan kota, jumlah dan kegiatan, pola migrasi dan penyebaran penduduk biasanya menjadi dasar bagi penentuan tata guna lahan dan kawasan, dan bagi penyediaan sarana prasarana yang diperlukan. Tetapi, **pada kondisi dual,**

perencanaan menjadi tidak banyak berarti, baik dari sisi antisipasi kegiatan maupun sebagai pengendali.

Di Indonesia, kota dibedakan dengan bukan kota dari bentuk kegiatan ekonomi penduduk dan tata guna lahan. Kota adalah tempat pemukiman dan pusat kegiatan penduduk, yang dibatasi dengan batas administrasi pemerintahan, sebagai satuan pemukiman yang tidak terpisah dan berperan pada satuan wilayah yang lebih besar. Satuan pemukiman kota mempunyai kegiatan non pertanian dan mempunyai ciri kehidupan kekotaan. (UU no 24 th.1992 tentang Penataan Ruang dan Permendagri no 2 th.1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, dan petunjuk pelaksanaannya.)

Rumusan tentang "ciri kehidupan kekotaan" pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini kabur karena tidak menjelaskan apakah ciri kehidupan kota ini hanya ditentukan oleh bentuk bangunan atau mempunyai juga dimensi sosial ekonomi dan budaya. Selain itu, hubungan kesatuan wilayah dengan kawasan lainnya, baik secara fungsional maupun secara fisik wilayah , dengan memperhatikan kondisi dualisme , juga menyebabkan tidak ada bedanya antara wilayah kota dengan wilayah perdesaan, dan kegiatan di kota dan didesa, kecuali komposisi tanah sawah yang lebih luas di daerah bukan kota tersebut dan besaran /skala dan intensitas kegiatan dibandingkan dengan yang ada di kota. Dalam perjalanan waktu, dengan munculnya bangunan bertingkat dan kemajuan teknologi dan semakin bervariasi sarana prasarana modern di kota, perbedaan kota dan desa di Indonesia mulai tampak secara fisik, tetapi tidak banyak berbeda pada sikap dan perilaku , atau mungkin mentalitas penduduk dari dua wilayah tersebut.

Kondisi dual ini akan lebih terjelaskan dengan teori Boeke, McGee, dan Evers dan Korff , tentang adanya dual sistem dan dual ekonomi pada kota-kota di Indonesia.

Yang perlu digaris bawahi tentang kondisi dual adalah bahwa **kondisi dual ini bukan merupakan suatu kesalahan**. Menurut Howard, dalam buku “The Garden City of Tomorrow” yang ditulisnya tahun 1891, bentuk ini adalah bentuk ketiga dari konsep “the three magnets”, dimana magnet pertama adalah kota (*town*), magnet kedua adalah desa (*country*), dan magnet ketiga adalah campuran antara desa dan kota, yang mestinya menjadi bentuk yang paling ideal.

b. Faktor pilihan tempat usaha PKL .

1). Faktor Lokasi

Letak lokasi PKL di tradisional zoning , dengan mengacu pada teori zoning Burgess, mestinya ada di zona CBD, atau centre region. Hal ini dipertanyakan kembali setelah dalam penelitiannya Hoyt menemukan adanya distorsi dalam tradisi zoning Burgess dan menolak teori pemisahan lokasi kegiatan penduduk secara rigid, dengan mengajukan bukti adanya sektor “kantong” hunian di lokasi lokasi industri atau CBD.

Meskipun temuan Burgess tentang adanya kegiatan ekonomi yang merusak lokasi hunian dan menyebabkan kekumuhan atau masalah lingkungan hunian relevant dengan penelitian ini, namun jalan keluar dengan pindah ke lokasi lain di luar kota, menjauhi lokasi industri, perlu dipelajari lebih jauh, karena mungkin hanya dapat diberlakukan untuk kegiatan industri berat di negara maju.

Pertanyaan muncul dalam aplikasi situasi tersebut di negara berkembang, dimana kegiatan ekonomi didominasi oleh kegiatan ekonomi rakyat, industri kecil dan kerajinan, serta sektor

informal dan sub produksi rumah tangga, sebagaimana dilaporkan McGee (1971) untuk negara-negara Asia. Pada kenyataannya, pendapat Hoyt lebih mungkin terjadi di negara berkembang, terutama karena industri berat tidak akan ditempatkan di pusat kota, dan lokasi industri kecil atau pemasaran dapat saja bercampur dengan hunian. Fenomena Ruko (rumah toko) dan home industri/*home working* adalah bukti tidak berlakunya zoning Burgess di Indonesia. Lokasi zona transisi bahkan muncul di tengah kota, terutama daerah dekat pasar atau tempat permanen berkumpulnya penduduk di siang hari, namun kosong di malam hari. Permukiman tidak khusus disediakan hanya untuk kelas menengah namun dihuni juga oleh kelas bawah, yaitu para pekerja kantoran maupun bukan. Analog dengan keadaan tersebut diatas, pemilihan lokasi observasi mestinya ditentukan dengan asumsi bahwa PKL mungkin merupakan bagian dari pita komersial "khas" di negara berkembang, yaitu : dapat berada dimana mana, tetapi selalu di pinggir jalan, dan terutama mengikuti pola-pola tertentu.

Pada kenyataannya, usaha PKL di lokasi penelitian ternyata tidak dipicu oleh upaya memanjangkan pelayanan bisnis tertentu ke masyarakat (dalam hal ini tidak ada kesamaan bentuk barang dagangan karena ketika sampai ke konsumen, bentuk barang sudah berubah, dari bahan mentah ke bahan termasak) tetapi alasan lain: merupakan pekerjaan pokok karena tidak ada pekerjaan lain/ tidak ada lowongan pekerjaan .

Pola pilihan lokasi usaha PKL di Semarang, diambil dari hasil pengamatan dan wawancara dengan PKL tentang tempat yang dianggap strategis, mengindikasikan adanya 3 pola, yaitu:

Pola pertama PKL yang dipicu oleh pusat

bisnis baik berupa pasar, mall atau pertokoan, dan tempat rekreasi/wisata.

- Pola kedua adalah pusat kerumunan atau tempat publik dimana banyak penduduk berkumpul, misal dekat sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga, terminal, dsb.
- Pola ketiga adalah tempat pemukiman, yang pada dasarnya adalah lokasi tempat tinggal konsumen yang akan membeli barang - barangnya. Konsumen akan mencari barang di tempat yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggalnya, sebelum pergi ke tempat yang lebih jauh.

2). Faktor Konsumen , Jarak, dan Harga

Konsumen mungkin bertempat tinggal jauh dari lokasi PKL. Penyediaan sentra PKL (resmi) atau munculnya kumpulan PKL (tidak resmi) tentunya akan memenuhi keperluan konsumen tertentu untuk barang tertentu, yang tidak akan didapatkan di tempat lain, atau, dalam perbandingan harga dan jarak, harga barang di sentra tersebut lebih murah atau barangnya lebih berkualitas , bila dibandingkan dengan harga dan barang di tempat lain. Faktor kemudahan untuk komunikasi dan ketersediaan jaringan transportasi diperkirakan menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan akibat kendala jarak dan cost/biaya ke pusat bisnis.

Bagi PKL, terutama bahan makanan, sebagai konsumen bahan baku tertentu di pasar, mereka akan mengambil bahan baku yang murah atau bahan yang bagus/berkualitas. Ketersediaan, harga, dan kualitas bahan dianggap lebih penting daripada ongkos yang harus dibayar ke lokasi pasar. Dalam kasus PKL Semarang, faktor waktu dasaran dan keberadaan pasar khusus/murah menghilangkan kendala jarak dan biayanya. PKL malam/sore akan memilih lokasi bahan baku di pasar pagi

(pasar biasa), sedangkan PKL pagi akan memilih berbelanja di pasar malam hari (khusus). Mungkin kontradiksi ini perlu diteliti lagi dikaitkan antara *transport cost* dengan keuntungan dari perbandingan pembelian bahan di lokasi tertentu dan menjual kepada konsumen tertentu

3). Faktor Sarana Prasarana : ketersediaan transportasi

Terkait dengan pemikiran tentang peran transportasi dalam kegiatan ekonomi dan pentingnya jalan dan transportasi dalam pertumbuhan PKL, dapat dipelajari temuan Ginsburg (1966) yang membedakan fungsi kota secara administrasi dan komersial serta mengidentifikasi adanya center-center berdasarkan fokus penumpukan kegiatan di komunitas modern yang mengutamakan efisiensi dan efektifitas kegiatan. Ginsburg menjelaskan bahwa teknologi transportasi bahkan memungkinkan adanya *network* antara center, antar kota yang terpisah/independent dari kondisi wilayah sekitar (hinterland kota). Semakin efisien transportasi, semakin tidak terikat sebuah kota pada wilayah sekitar, baik dalam hubungan sebagai central place maupun sebagai wilayah penghasil dan pasar.

Dikaitkan dengan pola pertumbuhan PKL dan darimana asal PKL, masalah kepadatan di kota, dan masalah perkotaan lainnya, dengan semakin luasnya jaringan transportasi antar kota dan mobilitas penduduk sementara (komuting) ada kemungkinan terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tidak ada kaitannya dengan pola ruang pemukiman, dan kepadatan ruang kegiatan tersebut berubah karena waktu buka tutup usaha, dimana pelaku usahanya bukan orang setempat, tetapi penduduk dari kota lain yang terkait dalam

network antar kota tersebut. Hal ini dapat menyebabkan munculnya kasus *hit and run*.

Situasi PKL Semarang yang diamati belum sampai pada tahap tersebut, karena mereka masih bersifat lokal, bertempat tinggal dekat dengan lokasi usaha meski dengan cara kost atau menyewa, hubungan dengan pelanggan dan konsumen sangat erat, tetap berusaha memberikan kualitas pelayanan yang terbaik yang dapat mereka berikan untuk menghadapi persaingan, dan menggunakan bahan baku setempat.

SIMPULAN

Dari pembahasan dapat disimpulkan sementara bahwa pada dasarnya **adanya konsumen, akses transportasi, serta lokasi strategis** diperkirakan merupakan kunci dari pola gerakan PKL dalam mengisi ruang kota. Untuk keperluan praktis, penyediaan tempat untuk PKL paling tidak harus memenuhi tiga hal tersebut. Dari penelitian ini ditemukan bahwa **PKL Semarang bukan merupakan perpanjangan suatu bentuk pelayanan fungsional dari usaha perdagangan formal di tempat sentral, dan bukan bagian dari hierarkhi struktur komersial di kota**. Mungkin PKL merupakan fenomena tersendiri atau merupakan bagian dari kegiatan komersial yang tidak berstruktur, masih perlu dipelajari lebih lanjut, dan tentunya akan digunakan teori dan metode yang lain. Kondisi dan situasi yang ada lebih menjelaskan adanya dual ekonomi atau masyarakat dual, yang sudah diungkap oleh Boeke sejak tahun 1930-an. Dan ini menarik, karena memberi tanda adanya persistensi, atau kemungkinan “kembalinya” suatu situasi meskipun sudah diupayakan untuk melakukan perubahan atau perbaikan.

Dari sisi ekonomi, perdagangan kaki lima dianggap dapat mengisi struktur fungsi yang kosong dan diperlukan oleh masyarakat tingkat bawah, sebagai tempat mencari barang dan jasa bagi konsumen, atau sebagai tempat menawarkan barang dan jasa bagi produsen. Secara umum, cara berdagang seperti ini akan tetap berlangsung, baik di Indonesia maupun tempat lain yang mempunyai tingkat ekonomi sudah maju, selama masih ada kebutuhan (*demand*) dari kelompok masyarakat tertentu. Fungsi memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu inilah yang tidak akan dapat digantikan oleh supermarket, mall, departement store, atau restoran dan toko-toko formal yang sudah ada. Bagi kelompok tertentu, tempat tempat yang disebut diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan, karena mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan nyata mereka di PKL.

Dilihat dari sisi pemanfaatan dan efisiensi struktur ruang terutama ruang publik, PKL mungkin perlu difahami sebagai kegiatan positif, karena telah melipatgandakan makna dan fungsi ruang, sehingga kehadirannya tidak perlu dipersoalkan. Mereka merupakan potensi yang dapat didayagunakan sebagai bagian dari dinamika kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan, yang akan memberi kontribusi secara langsung pada kehidupan masyarakat kota dan sekaligus memberi kesempatan kerja bagi kelompok tertentu, kelompok ekonomi lemah di perkotaan. Selain itu PKL juga dapat dijadikan indikator kondisi perekonomian suatu masyarakat, atau alat ukur bagi tingkat perekonomian suatu daerah, karena kemunculannya seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan PHK.

DAFTAR PUSTAKA

- Data sekunder dan primer tentang PKL lokasi penelitian dan Perda tentang RSTRK serta penataan PKL.
- Alisyahbana, 2003, "Urban Hidden Economy, Peran tersembunyi Sektor Informal Perkotaan", ITS, Surabaya**
- Berry JL, 1963, "General Features of the Urban Commercial Structure", di Bourne 1971, hal. 361- 367.**
- Bourne LS, 1971, "Internal Structure of the City", Oxford, Toronto**
- Burgess, 1925, "The City", di Hoyt (1939) di Bourne 1971, hal. 84**
- Castells M, 1977, "The Urban Question", London**
- Evers dan Korff, 2002, "Urbanisme di Asia Tenggara", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta**
- McGee T, 1971, "The Urbanization Process in the Third World", di Manning 1983, hal. 34-60.**
- Geertz, 1965, "Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa".**
- Gidden A, 1994, "Living in a Post Tradisional Society", Cambridge**
- Hall P, 1998, "City for Tomorrow", Blackwell, UK**
- Howard E, 1971, "The Garden City of Tomorrow", MIT**
- Hoyt H, 1939, "Recent Distortions of the Classical Models of Urban Structure", di Bourne 1971, hal. 84-96.**
- Manning dan Effendi, 1983, "Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.**
- Nastiti TS, 2003, "Pasar di Jawa Jaman Mataram Kuno", Pustaka Jaya, Jakarta.**
- Raharjo S, 2002, "Peradaban Jawa", Komunitas Bambu, Jakarta.**